JDSP
Jurnal Data Science Penusa
E-ISSN: 1234-5678

STRATEGI ADMINISTRASI DIGITALISASI DALAM PENGEMBANGAN LAYANAN PARIDASA HINDU DHARMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA (PHDI SUMUT)

Yogita Jaya[1)*], Osman Manalu [2)]
[1*,2)]Bisnis Digital, STMIK Pelita Nusantara, Medan, Indonesia
[1)]geethadurgajayashri@gmail.com, [2)] osmanmanalu7403@gmail.com

Received: 5 November 2025 Accepted: 25 Juni 2026 Published: 6 July 2026
Pp. 172-186

***Penulis Koresponden**

Kata Kunci:
Administrasi Digital, Digitalisasi Layanan, Sistem Berbasis Web, PHDI Sumatera Utara

JDSP: Jurnal Data Science Penusa dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

Abstrak : Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat telah mendorong banyak organisasi, termasuk lembaga keagamaan, untuk melakukan transformasi digital. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi kendala dalam pengelolaan administrasi karena sebagian besar prosesnya dilakukan secara manual, sehingga menghambat kecepatan pelayanan dan efisiensi kerja. Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi digitalisasi administrasi yang mampu meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan di PHDI Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap ketua dan staf administrasi PHDI. Data analisis secara deskriptif untuk merumuskan kebutuhan sistem dan merancang prototipe berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL dengan model pengembangan Waterfall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi digital yang dirancang dapat mempercepat proses pengajuan layanan, verifikasi dokumen, serta penyimpanan arsip secara terintegrasi. Pengujian menggunakan metode black box testing memperlihatkan bahwa seluruh fitur utama sistem berfungsi dengan baik sesuai kebutuhan pengguna. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan administrasi digital mampu meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan transparansi pelayanan, serta menjadi langkah awal bagi PHDI Sumatera Utara untuk membangun tata kelola lembaga keagamaan yang modern dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat di era teknologi bisnis digital telah mendorong berbagai organisasi, termasuk lembaga non-profit dan keagamaan, untuk melakukan transformasi digital. Digitalisasi menjadi sebuah keharusan dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan. Seperti yang dijelaskan oleh Marwiyah (2023) dalam bukunya *Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digitalisasi*, adopsi teknologi digital adalah langkah strategis untuk menciptakan tata kelola yang lebih modern, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi ini mencakup digitalisasi proses administrasi, pengelolaan data, dan interaksi dengan publik, yang bertujuan untuk memangkas birokrasi, mempercepat layanan, dan meningkatkan transparansi.

Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sumatera Utara (PHDI SUMUT) merupakan salah satu lembaga yang masih menghadapi kendala signifikan dalam sistem administrasinya. Saat ini, seluruh proses administrasi di PHDI SUMUT masih dilakukan secara manual, yang menimbulkan serangkaian masalah.

Masalah-masalah tersebut meliputi lambatnya proses layanan surat-menyurat, risiko tinggi hilangnya arsip atau kerusakan data fisik, serta kesulitan dalam melacak riwayat administrasi karena pergantian pengurus. Kondisi ini secara langsung berdampak negatif pada umat Hindu yang membutuhkan layanan, terutama bagi mereka yang tidak bisa datang ke kantor karena kesibukan, tinggal di luar kota, atau bahkan di luar negeri, sehingga layanan yang seharusnya cepat menjadi terhambat.

Permasalahan yang dialami oleh PHDI SUMUT dapat diselesaikan melalui implementasi strategi digitalisasi. Berdasarkan referensi utama, Marwiyah (2023) menguraikan bahwa digitalisasi pelayanan publik dapat secara signifikan meningkatkan kepuasan pengguna melalui empat pilar utama: kecepatan, transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses. Studi tersebut juga menyoroti bahwa penggunaan platform digital untuk layanan administrasi dapat mengurangi antrian, meminimalkan kesalahan manual, dan memungkinkan layanan diakses dari mana saja. Pengalaman dari organisasi lain yang berhasil menerapkan digitalisasi, seperti yang dideskripsikan dalam buku tersebut, menjadi bukti kuat bahwa solusi serupa dapat diterapkan di PHDI SUMUT untuk mengatasi masalah yang ada.

Untuk menyelesaikan masalah ini, penelitian akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode ini dianggap paling sesuai karena memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi mendalam, wawancara, dan analisis dokumen di lingkungan PHDI SUMUT. Pemilihan metode ini bertujuan untuk merancang sebuah model strategi administrasi digitalisasi yang tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga praktis dan dapat diimplementasikan secara efektif. Alasan utama penggunaan metode ini adalah untuk memahami secara komprehensif akar masalah dan merumuskan solusi yang tepat guna, bukan hanya sekadar solusi generik.

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi, tantangan, dan urgensi transformasi digital di PHDI SUMUT, maka penelitian ini berjudul **Strategi Administrasi Digitalisasi dalam Pengembangan Layanan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sumatera Utara (PHDI SUMUT)**. Judul ini mencerminkan fokus penelitian yang akan merumuskan dan menerapkan strategi digitalisasi untuk menciptakan layanan yang lebih efisien, transparan, dan mudah dijangkau oleh seluruh umat.

TINJAUAN LITERATUR

Administrasi Digital

Administrasi digital secara umum dapat dipahami sebagai upaya modernisasi sistem administrasi tradisional melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Proses administrasi yang dulunya mengandalkan dokumen kertas, interaksi tatap muka, serta mekanisme birokrasi manual, kini bergeser menjadi aktivitas berbasis elektronik yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Konsep ini berhubungan erat dengan gagasan transformasi digital yang menekankan efisiensi, akurasi, dan keterbukaan informasi dalam tata kelola organisasi. Menurut Fischer et al. (2021), digitalisasi dalam administrasi publik bukan hanya sebatas mengganti media dari kertas ke elektronik, melainkan mencakup perubahan fundamental dalam cara kerja organisasi, pola komunikasi antar pemangku kepentingan, serta penggunaan data dalam pengambilan keputusan. Administrasi digital dengan demikian diposisikan sebagai fondasi penting bagi terciptanya organisasi modern yang responsif terhadap tuntutan masyarakat.

Para ahli menekankan bahwa administrasi digital tidak boleh dipahami secara sempit sebagai pengarsipan elektronik, melainkan sebagai sebuah sistem yang memadukan teknologi, manusia, dan proses kerja. Paendong (2023) menjelaskan bahwa administrasi digital menciptakan pola baru dalam pengelolaan arsip, manajemen layanan, serta koordinasi internal organisasi melalui media daring yang terintegrasi. Hal ini memperkuat pernyataan Bellon (2024) bahwa administrasi digital membentuk "lingkungan kerja baru" di mana teknologi digital menjadi perangkat utama dalam mendukung kecepatan pelayanan, efisiensi sumber daya, serta peningkatan transparansi birokrasi. Dari perspektif organisasi keagamaan, implementasi administrasi digital berarti membuka ruang partisipasi umat secara lebih luas, sekaligus memudahkan pengurus dalam menjaga akuntabilitas sebuah lembaga.

Sistem Informasi

Sistem informasi secara umum dipahami sebagai seperangkat komponen yang terdiri dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta data yang saling terintegrasi untuk mengolah informasi sehingga dapat mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan strategis organisasi. Sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, melainkan juga sebagai instrumen yang mampu mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan berguna dalam proses pengambilan keputusan. Menurut

Sutanta (2020), sistem informasi modern berperan penting dalam mewujudkan efisiensi organisasi, karena memungkinkan proses kerja berlangsung lebih cepat, terukur, dan dapat dipantau secara real-time.

Dalam literatur terbaru, sistem informasi dipandang sebagai kerangka kerja yang mendukung efisiensi dan efektivitas organisasi. Arifin (2022) menegaskan bahwa sistem informasi adalah komponen strategis yang meningkatkan produktivitas serta kualitas pelayanan melalui ketersediaan data yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Mahmoudian dan Mousavi (2023) bahkan menekankan bahwa sistem informasi berbasis web dapat berfungsi sebagai decision support system (DSS) yang membantu manajerial dalam menganalisis permasalahan dan merumuskan strategi. Dengan demikian, sistem informasi bukan sekadar alat teknologi, melainkan infrastruktur manajerial yang membangun ekosistem kerja terintegrasi.

Teknologi Informasi

Teknologi informasi (TI) secara umum didefinisikan sebagai kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, serta sumber daya manusia yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. TI menjadi fondasi utama bagi organisasi dalam menjalankan transformasi digital, karena menyediakan sarana untuk meningkatkan efisiensi, memperluas akses, dan mempercepat distribusi informasi. Menurut Wahyudi (2021), TI bukan sekadar perangkat elektronik, tetapi merupakan ekosistem yang memungkinkan organisasi mengelola data secara terpadu dan efektif.

Moser-Plautz (2023) menyatakan bahwa transformasi digital dalam organisasi publik tidak dapat dilepaskan dari penggunaan teknologi informasi, karena teknologi inilah yang mendorong perubahan struktural maupun budaya kerja. Sementara itu, Hidayat (2022) menekankan bahwa TI bukan hanya alat bantu teknis, melainkan katalis yang mengubah pola interaksi, proses bisnis, dan cara organisasi berinovasi. Dengan demikian, TI memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan manajerial yang luas.

Perancangan Sistem Berbasis Web

Perancangan sistem berbasis web merupakan proses merancang dan membangun sistem informasi yang dapat diakses melalui jaringan internet dengan memanfaatkan teknologi web sebagai platform utama. Secara umum, sistem berbasis web dianggap lebih unggul karena dapat digunakan tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga mendukung prinsip aksesibilitas dan keterjangkauan. Menurut Putra (2021), sistem berbasis web memberikan keunggulan dalam hal keterhubungan lintas platform serta biaya implementasi yang relatif rendah dibandingkan aplikasi berbasis desktop.

Dalam penelitian terbaru, Kartika (2022) menegaskan bahwa perancangan sistem berbasis web tidak hanya mencakup desain antarmuka, tetapi juga melibatkan aspek struktur data, keamanan sistem, serta pengalaman pengguna. Mahmoudian dan Mousavi (2023) mengembangkan sistem berbasis web yang berfungsi sebagai DSS, menunjukkan bahwa pendekatan berbasis web mampu meningkatkan akurasi evaluasi proyek secara signifikan. Penelitian Sinaga (2024) juga membuktikan bahwa perancangan web berbasis UI/UX yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kenyamanan dan efektivitas pengguna.

Digitalisasi Pelayanan Publik

Digitalisasi pelayanan publik secara umum dipahami sebagai proses transformasi layanan pemerintah atau organisasi publik dari metode konvensional ke platform berbasis teknologi digital. Tujuan utamanya adalah menciptakan layanan yang lebih cepat, transparan, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Menurut Sari (2020), digitalisasi layanan publik merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Latupeirissa (2024) menjelaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik adalah strategi komprehensif yang mencakup modernisasi proses kerja, pemanfaatan teknologi informasi, serta integrasi antar lembaga. Andersson (2022) juga menekankan bahwa digitalisasi tidak sekadar menambahkan perangkat elektronik dalam birokrasi, melainkan menyusun ulang konfigurasi kerja dan interaksi antar pihak. Dengan demikian, digitalisasi pelayanan publik memiliki dimensi strategis dalam membangun tata kelola modern dan inklusif.

METODE PENELITIAN

1. Pengumpulan Data

   Tahap pengumpulan data menjadi fondasi dari seluruh proses penelitian, karena kualitas data yang diperoleh akan sangat memengaruhi hasil akhir penelitian. Pengumpulan data di PHDI Sumatera Utara dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan di kantor PHDI Sumut untuk mengamati proses administrasi dan layanan yang berjalan sehari-hari, termasuk pengelolaan dokumen, interaksi pengurus dengan umat, serta penggunaan media komunikasi digital seperti WhatsApp yang masih terbatas. Observasi ini memberikan gambaran nyata tentang kondisi administrasi yang dominan manual, penyimpanan arsip fisik, dan keterbatasan digitalisasi. Sementara itu, wawancara mendalam dengan Ketua PHDI dan admin bertujuan untuk menggali informasi tentang sejarah organisasi, alur administrasi, kendala, dan harapan pengurus terhadap sistem digital. Kombinasi observasi dan wawancara ini memastikan data yang diperoleh lengkap dan mencerminkan kondisi lapangan secara akurat. Analisis Data
   Metode penelitian ini dilaksanakan setelah proses pengumpulan data, di mana data dari observasi, wawancara, dan studi pustaka dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

2. Penentuan Ruang Lingkup Penelitian

   Ruang lingkup penelitian ditetapkan agar fokus penelitian tetap jelas dan realistis. Penelitian ini berfokus pada proses administrasi surat-menyurat dan pelayanan umat Hindu di PHDI Sumatera Utara. Lokasi penelitian berada di kantor PHDI Sumut di Jalan KH. Zainul Arifin No. 134, Medan, yang merupakan pusat kegiatan administrasi organisasi. Subjek penelitian mencakup Ketua PHDI sebagai pengambil keputusan dan admin sebagai pengelola layanan harian, sementara objek penelitian difokuskan pada proses penerimaan permohonan, verifikasi dokumen, dan penyimpanan arsip. Dengan membatasi penelitian pada prototipe sistem berbasis web dan tidak mencakup aplikasi mobile atau sistem lintas wilayah, ruang lingkup tetap realistis sesuai sumber daya yang tersedia. Teknik pengumpulan data dipilih untuk memperoleh informasi yang mendalam dan beragam. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama: wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan data primer mengenai pengalaman, kendala, dan harapan pengurus terhadap digitalisasi layanan. Dokumentasi meliputi arsip, catatan administrasi, dan formulir manual yang menunjukkan alur kerja yang telah berjalan. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah jurnal, buku, dan laporan penelitian terdahulu untuk memperkuat landasan teori serta membandingkan praktik digitalisasi di organisasi serupa. Dengan kombinasi teknik ini, data yang diperoleh tidak hanya akurat, tetapi juga memiliki dasar teoretis yang kuat.

3. Instrument Penelitian

   Instrumen penelitian disiapkan untuk menjaga konsistensi dan kelengkapan data. Instrumen utama berupa pedoman wawancara yang dirancang agar percakapan terstruktur, mencakup topik tentang sejarah organisasi, alur administrasi, kendala layanan, dan ekspektasi digitalisasi. Dokumen arsip dan formulir administrasi digunakan sebagai data sekunder untuk melihat pola kerja yang sudah berjalan. Selain itu, peneliti menggunakan perekam suara, kamera, dan catatan lapangan untuk mendokumentasikan informasi secara menyeluruh. Kombinasi instrumen ini meminimalkan risiko kehilangan data dan mendukung analisis yang akurat

4. Analisis Data

   Tahap akhir adalah analisis data, dilakukan secara deskriptif kualitatif. Proses dimulai dengan reduksi data, yaitu menyaring informasi penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan agar lebih mudah dipahami. Analisis dilanjutkan dengan mengidentifikasi pola, hubungan antar data, dan menarik kesimpulan. Kesimpulan ini menjadi dasar dalam perancangan prototipe sistem berbasis web. Tahap pengembangan sistem menggunakan metode Waterfall, meliputi analisis kebutuhan pengguna, perancangan basis data dan antarmuka, implementasi menggunakan PHP dan MySQL, pengujian dengan black box testing, serta evaluasi berdasarkan umpan balik pengguna. Metode ini dipilih karena strukturnya yang sistematis sesuai dengan

penelitian berbasis sistem informasi.

ANALISIS DATA

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles & Huberman (1994), yaitu:

tabel 4. 1 Tabel analisis data

Tahapan	Penjelasan
Reduksi Data	Penyederhanaan hasil wawancara dan observasi dengan memilih informasi yang relevan dengan kebutuhan sistem digital.
Penyajian Data	Data disusun dalam bentuk tabel, ringkasan proses kerja, dan daftar masalah sehingga mudah dianalisis.
Penarikan Kesimpulan	Kesimpulan muncul setelah pola permasalahan dan kebutuhan sistem terlihat jelas dari data yang dikumpulkan.

Dengan demikian, analisis data tidak hanya menggambarkan kondisi lapangan, tetapi juga menghasilkan dasar logis dalam merancang aplikasi digital yang sesuai kebutuhan pengguna.

Analisa Metode

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga keagamaan yang memiliki peran dalam pembinaan, koordinasi, dan pelayanan administrasi umat Hindu di wilayah Sumatera Utara. PHDI Sumut beralamat di Jl. KH. Zainul Arifin No. 134, Medan, dan menjadi pusat pelayanan administrasi bagi umat Hindu yang membutuhkan dokumen resmi terkait kegiatan keagamaan maupun sosial. Struktur organisasi PHDI Sumut terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang-bidang Pembinaan, dan petugas administrasi yang mengelola pelayanan harian.

Kantor PHDI Sumut beroperasi pada hari Senin hingga Jumat, pukul 08.00–16.00 WIB, dengan sistem pelayanan yang masih berbasis tatap muka. Dalam kondisi ini, umat Hindu yang berada di luar kota Medan sering mengalami kesulitan dalam mengurus layanan karena harus datang secara langsung ke kantor.

Adapun layanan administrasi yang diberikan PHDI Sumut, antara lain:

Jenis Layanan	**Keterangan**	**Pihak Terlibat**
Surat Rekomendasi Kegiatan Keagamaan	Untuk pelaksanaan upacara, kegiatan banjar, dan pura	Umat → Admin → Ketua
Surat Keterangan Umat Hindu	Bukti status keumatan untuk keperluan sekolah atau pekerjaan	Umat → Admin
Surat Rekomendasi Pernikahan	Untuk kebutuhan pernikahan adat dan agama Hindu	Umat → Pemuka Agama → Ketua
Pengarsipan Data Kegiatan	Penyimpanan catatan kegiatan pura dan organisasi	Admin → Ketua
Pengelolaan Data Umat Hindu	Pendataan umat berdasarkan wilayah banjar	Admin

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus, dan metode ini bekerja efektif dalam konteks PHDI Sumut karena:

1. Observasi Lapangan memberikan pemahaman nyata mengenai:
   - Alur pelayanan manual,
   - Pengelolaan dokumen fisik,
   - dan Pola interaksi petugas dengan umat.

Dari observasi terlihat bahwa penyimpanan dokumen masih menggunakan map arsip, sehingga ketika dokumen dibutuhkan kembali, proses pencarian menjadi lama.

2. Wawancara Mendalam dilakukan dengan:
   - Ketua PHDI (untuk mengetahui kebijakan dan alur persetujuan)
   - Admin Pelayanan (untuk memahami hambatan teknis dan operasional)

Wawancara menunjukkan bahwa banyak umat harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkan dokumen karena proses verifikasi dilakukan manual dan berjenjang.

Dokumentasi Arsip mendukung temuan bahwa:
- Arsip mudah rusak karena disimpan dalam rak fisik
- Tidak ada backup digital,
- Tidak ada sistem penomoran arsip yang konsisten.

Hasil analisis ini menjadi dasar perancangan sistem administrasi digital yang:
- Memungkinkan pengajuan dokumen secara online
- Menyediakan dashboard untuk melacak status layanan
- Menghadirkan verifikasi digital oleh admin dan ketua
- Menyimpan dokumen dalam basis data terstruktur sehingga mudah dicari kembali

Dengan demikian, metode kualitatif yang digunakan tidak hanya mengumpulkan data, tetapi menghasilkan solusi nyata yang relevan dengan kebutuhan PHDI Sumatera Utara.

1. Jadwal

tabel 4. 2 Jam Operasional PHDI

Jam Buka	Jam Tutup	Hari
08.00 Wib	16.00 Wib	Senin - jumat

2. Daftar Layanan yang ditawarkan

tabel 4. 3 Daftar layanan yang ditawarkan

Jenis Layanan	**Keterangan**	**Pihak Terlibat**
Surat Rekomendasi Kegiatan Keagamaan	Untuk pelaksanaan upacara, kegiatan banjar, dan pura	Umat → Admin → Ketua
Surat Keterangan Umat Hindu	Bukti status keumatan untuk keperluan sekolah atau pekerjaan	Umat → Admin
Surat Rekomendasi Pernikahan	Untuk kebutuhan pernikahan adat dan agama Hindu	Umat → Pemuka Agama → Ketua
Pengarsipan Data Kegiatan	Penyimpanan catatan kegiatan pura dan organisasi	Admin → Ketua
Pengelolaan Data Umat Hindu	Pendataan umat berdasarkan wilayah banjar	Admin

HASIL PENELITIAN

Analisa SWOT

Selain temuan mengenai alur layanan dan kebutuhan digitalisasi, penelitian ini juga melakukan analisis SWOT untuk menilai kondisi internal dan eksternal PHDI Sumatera Utara dalam proses transformasi menuju administrasi digital. Analisis ini digunakan untuk menentukan posisi kesiapan organisasi serta strategi

pengembangan sistem.

Aspek	Temuan Utama	Penjelasan
Strengths (Kekuatan)	Struktur organisasi jelas dan peran tugas terdistribusi	PHDI Sumut memiliki susunan kepengurusan yang terorganisir sehingga memudahkan koordinasi administratif dan proses pengambilan keputusan.
	Kepercayaan umat yang tinggi terhadap lembaga	PHDI merupakan otoritas resmi umat Hindu, sehingga setiap layanan administratif memiliki legitimasi dan diterima oleh masyarakat Hindu.
	Komitmen pengurus untuk beradaptasi dengan teknologi	Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengurus mendukung modernisasi sistem pelayanan.
Weaknesses (Kelemahan)	Proses administrasi masih manual	Pengajuan dan pengarsipan dilakukan melalui formulir kertas sehingga rawan lambat, menumpuk, dan sulit dilacak.
	Belum adanya sistem digital terintegrasi	Tidak tersedia aplikasi atau basis data yang menyimpan informasi umat secara terstruktur.
	Ketergantungan pada kehadiran fisik pemohon	Umat di luar Medan kesulitan mengurus dokumen karena harus datang langsung ke kantor.
Opportunities (Peluang)	Peningkatan kualitas layanan berbasis teknologi	Digitalisasi dapat mempercepat pelayanan dan meningkatkan kepuasan umat.
	Banyak umat telah menggunakan perangkat digital	Akses internet dan smartphone yang luas memudahkan implementasi sistem web.
	Kesempatan memperluas jaringan layanan secara regional	Sistem digital dapat menjangkau umat di luar kota maupun luar provinsi.
Threats (Ancaman)	Keterbatasan kemampuan SDM dalam penggunaan aplikasi	Diperlukan pelatihan intensif agar admin dan pengurus mampu mengoperasikan sistem.
	Risiko keamanan data digital	Penyimpanan data umat harus dilindungi dari ancaman kebocoran informasi.
	Resistensi perubahan budaya kerja	Sebagian pengurus lebih terbiasa dengan arsip fisik dan proses manual.

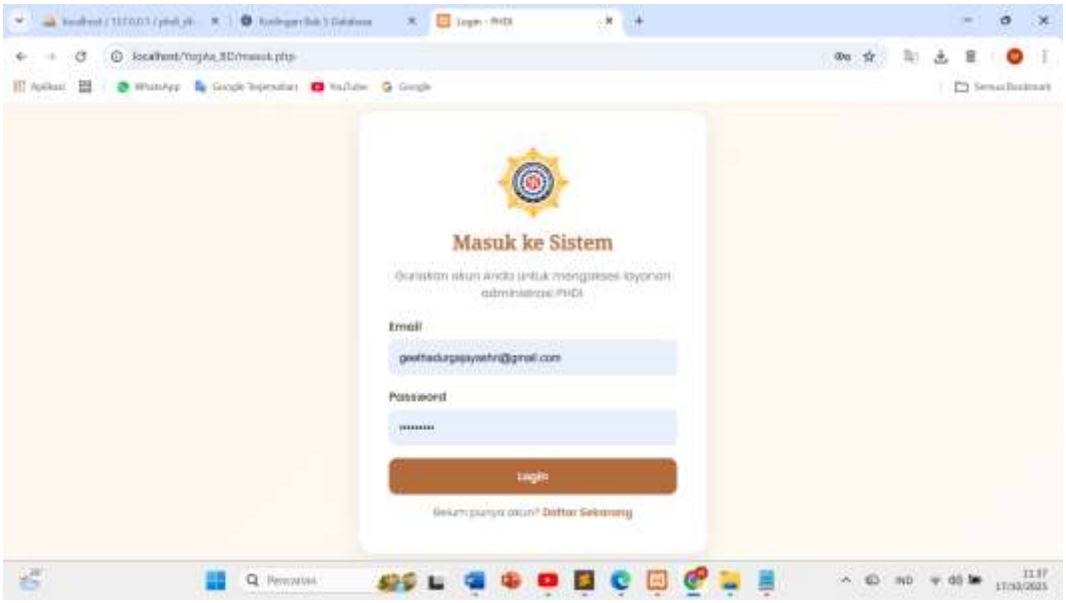
PEMBAHASAN

Implementasi sistem digitalisasi administrasi pada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sumatera Utara diwujudkan dalam bentuk aplikasi berbasis web yang telah dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Sistem ini bertujuan untuk mendukung pelayanan administrasi umat secara lebih efisien, cepat, dan terintegrasi.

Bukti implementasi sistem ditunjukkan melalui serangkaian tampilan antarmuka (screenshoot) yang telah disusun pada dokumen lampiran. Setiap tampilan dijelaskan alurnya sebagai berikut:

1. Halaman Beranda / Login (Gambar 5.1)

E-ISSN: 1234-5678

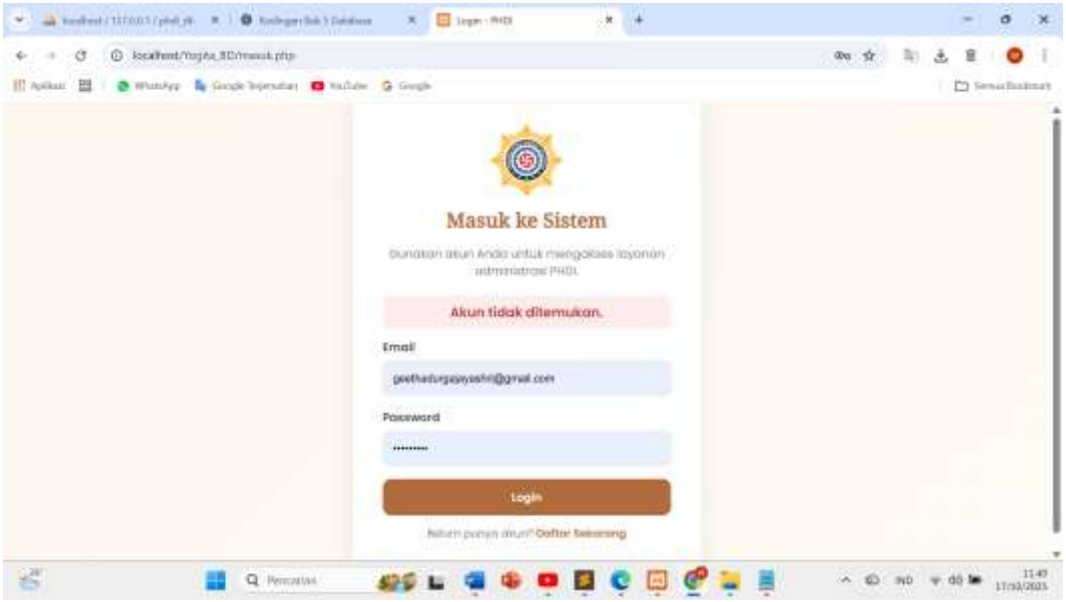


Gambar 5. 1 Tampilan halaman beranda/login

Tahap pertama penggunaan aplikasi dimulai dari tampilan beranda atau halaman login. Di bagian ini, pengguna yang merupakan umat Hindu diarahkan untuk masuk ke sistem dengan memasukkan alamat email dan kata sandi yang telah terdaftar. Tampilan login dirancang sederhana agar mudah digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk umat yang baru pertama kali menggunakan sistem. Halaman ini juga berfungsi sebagai pintu utama menuju seluruh layanan administrasi digital PHDI, serta menyediakan akses cepat menuju fitur pendaftaran bagi pengguna baru.

Fungsi utama halaman ini adalah memastikan keamanan akses ke dalam sistem. Dengan mekanisme login, setiap aktivitas pengguna dapat dilacak dan disimpan dalam basis data untuk menjamin keakuratan serta akuntabilitas data. Selain itu, sistem juga secara otomatis akan memverifikasi kecocokan data login sebelum mengizinkan pengguna masuk ke dashboard, sehingga mencegah akses tidak sah terhadap informasi lembaga maupun data pribadi umat.

2. Halaman Beranda Jika Akun Belum Terdaftar (Gambar 5.2)

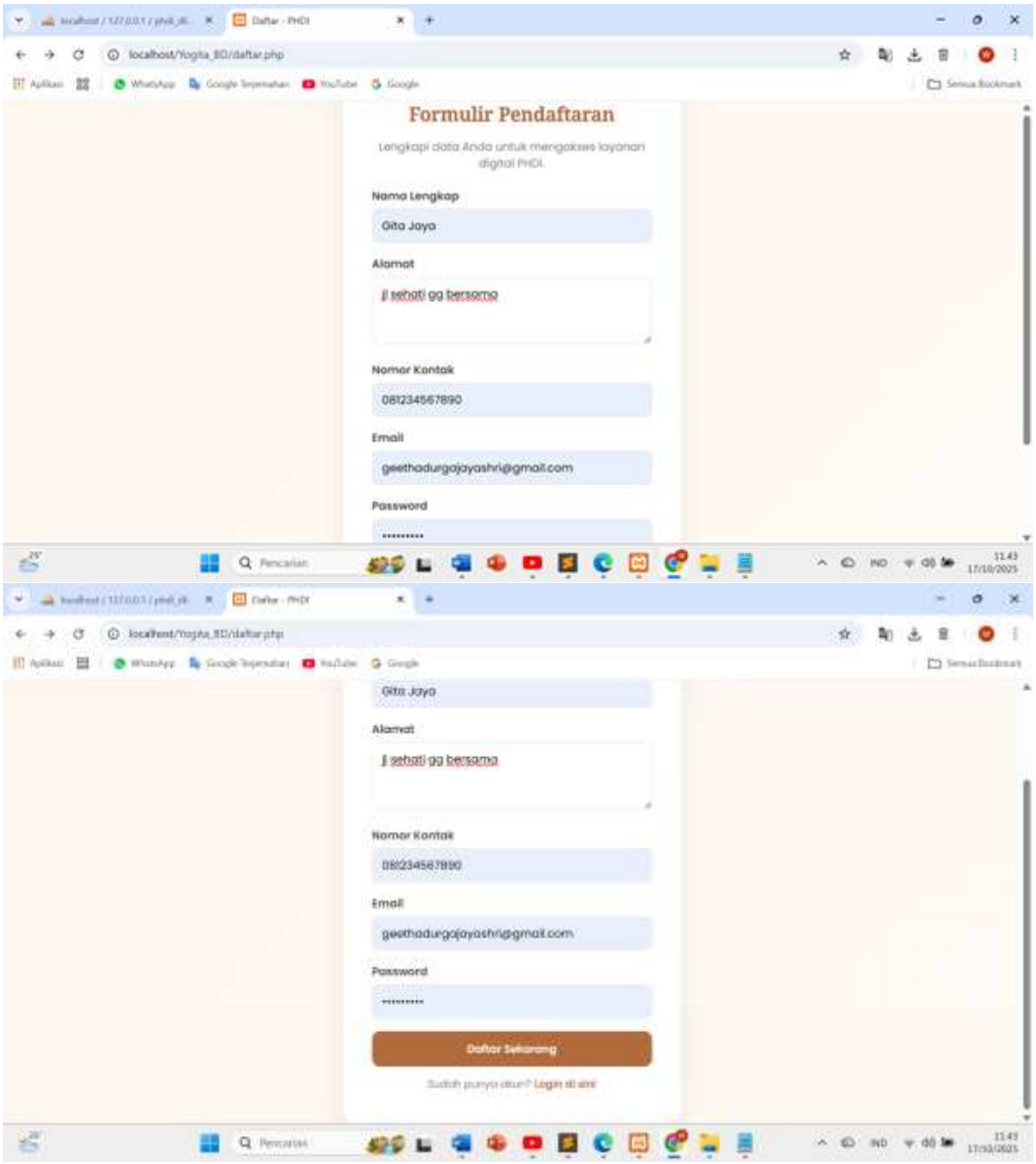


Gambar 5. 2 Tampilan halaman beranda/login jika akun belum didaftarkan

Apabila pengguna mencoba masuk tanpa memiliki akun, sistem akan menampilkan pemberitahuan bahwa data belum terdaftar. Tampilan ini berfungsi sebagai pengingat agar pengguna segera melakukan registrasi akun sebelum dapat mengakses layanan digital. Dalam halaman ini juga disediakan tautan langsung menuju halaman pendaftaran agar proses registrasi dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa kebingungan.

Tahap ini dirancang untuk menjaga integritas sistem dan memastikan hanya pengguna resmi yang dapat memanfaatkan layanan digital PHDI. Dengan cara ini, data administrasi yang masuk tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya lembaga dalam menerapkan sistem keamanan berbasis autentikasi pengguna sesuai standar digital governance yang baik.

3. Halaman Pendaftaran Akun Baru

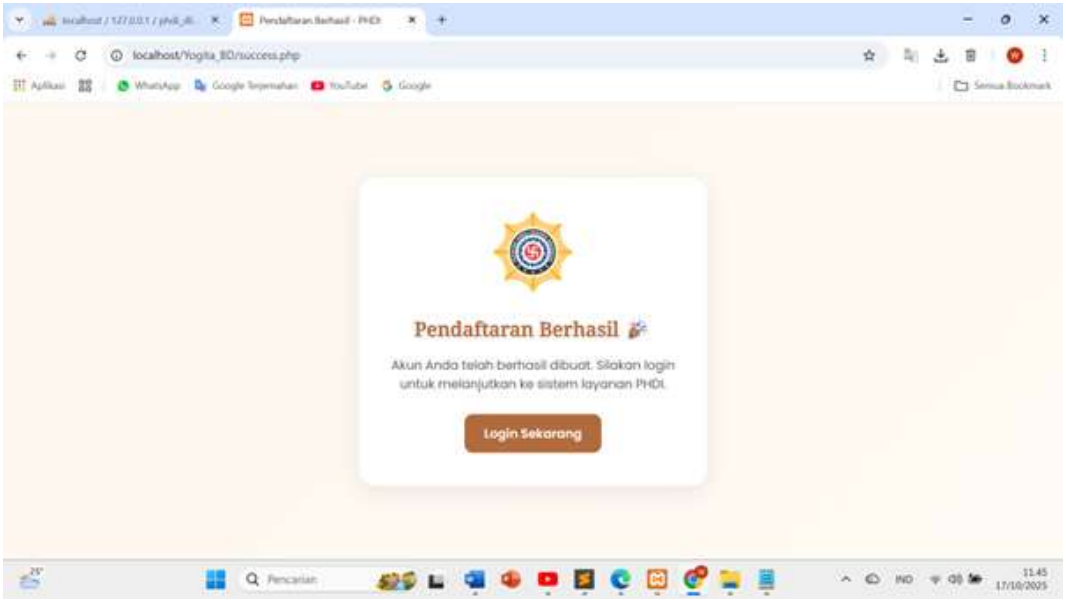


Gambar 5. 3 Tampilan halaman pendaftaran akun baru

Pada tahap ini, umat yang belum memiliki akun dapat melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir berisi data diri seperti nama lengkap, alamat, nomor kontak, dan email aktif. Selain itu, pengguna juga perlu membuat kata sandi sebagai kunci akses ke sistem. Setelah seluruh data diisi dengan benar, sistem akan menyimpannya ke dalam database umat untuk keperluan login di kemudian hari.

Rancangan halaman pendaftaran ini mendukung prinsip efisiensi dan kemudahan akses. Dengan adanya fitur pendaftaran mandiri, umat tidak perlu datang langsung ke kantor PHDI untuk mendaftar. Semua proses dapat dilakukan secara daring dan otomatis tersimpan di sistem. Langkah ini juga memastikan bahwa setiap akun terverifikasi dan memiliki identitas unik, sehingga aktivitas pengguna dapat dipantau dengan baik oleh admin.

4. Halaman Notifikasi Pendaftaran Berhasil (Gambar 5.4)

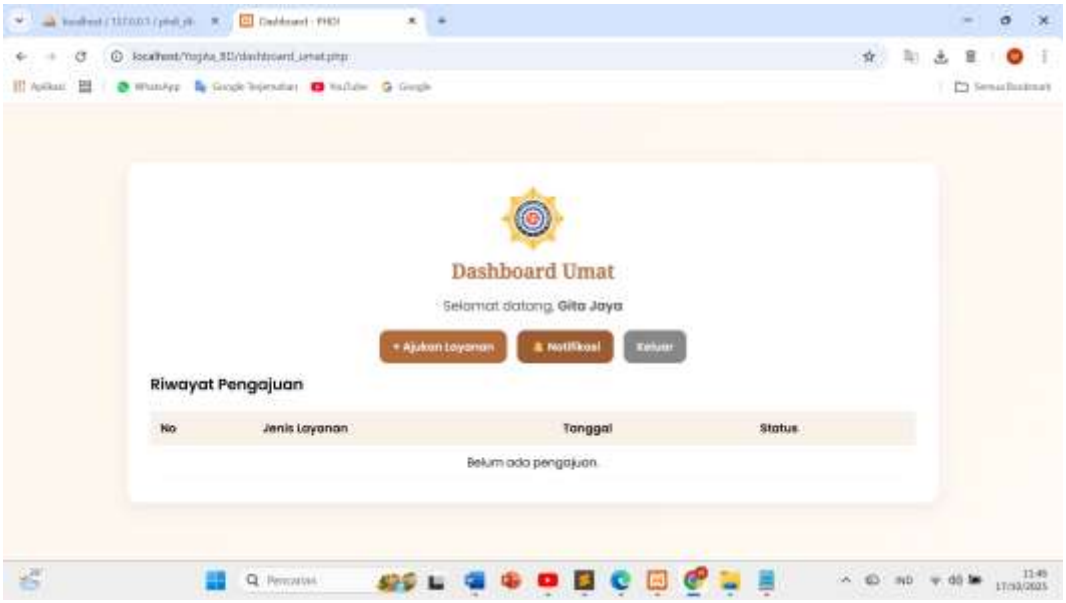


Gambar 5. 4 tampilan halaman notifikasi apabila pendaftaran akun berhasil

Setelah proses registrasi selesai, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa pendaftaran akun telah berhasil. Tampilan ini berfungsi sebagai bentuk konfirmasi otomatis yang memberi tahu pengguna bahwa akun mereka sudah aktif dan dapat digunakan untuk login. Pemberitahuan ini menjadi tanda bahwa data pengguna telah diterima dan tersimpan dengan benar di dalam basis data.

Adanya fitur notifikasi ini menunjukkan transparansi sistem dalam memberikan umpan balik secara real-time kepada pengguna. Dengan demikian, umat tidak perlu menunggu konfirmasi manual dari admin untuk mulai menggunakan aplikasi. Proses ini sekaligus memperlihatkan bahwa sistem digital PHDI sudah mengimplementasikan prinsip pelayanan cepat dan mandiri berbasis teknologi.

5. Halaman Dashboard Umat

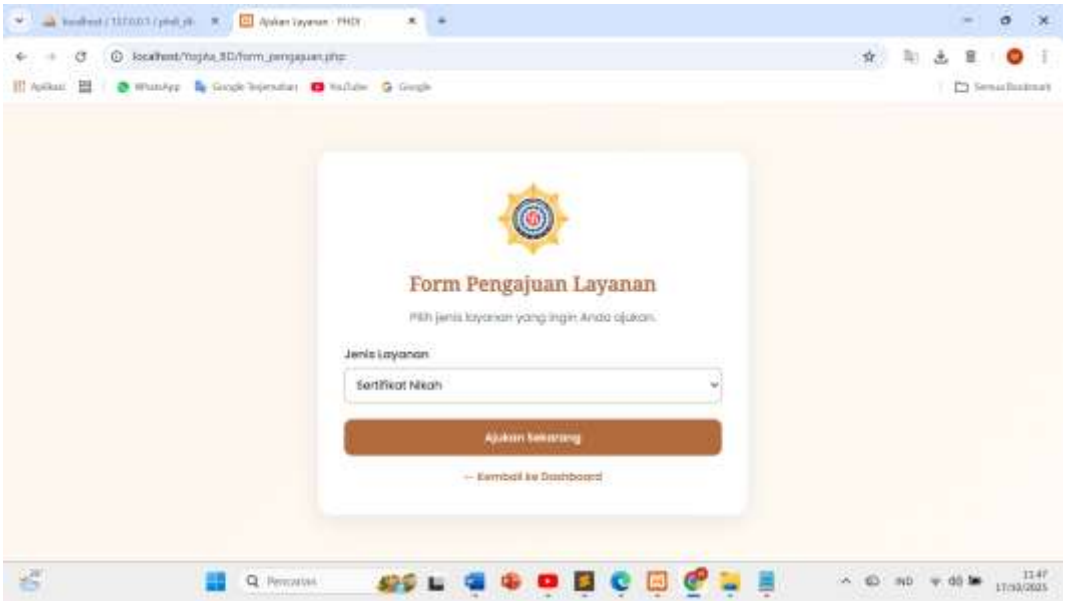


Gambar 5. 5 Tampilan dashboard umat beserta fitur fiturnya

Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard. Di sini terdapat berbagai fitur utama seperti pengajuan layanan, riwayat pengajuan sebelumnya, status verifikasi dokumen, serta tombol logout. Dashboard berfungsi sebagai pusat aktivitas pengguna, tempat umat dapat memantau seluruh proses administrasi yang telah atau sedang dijalankan.

Desain dashboard dibuat interaktif dan responsif agar mudah diakses dari perangkat apa pun. Informasi mengenai status layanan—seperti "menunggu verifikasi", "disetujui", atau "ditolak"—ditampilkan secara jelas untuk membantu umat memahami posisi pengajuan mereka. Dengan fitur ini, umat bisa melakukan pemantauan tanpa harus menghubungi admin secara langsung, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan transparan.

6. Halaman Form Pengajuan Layanan



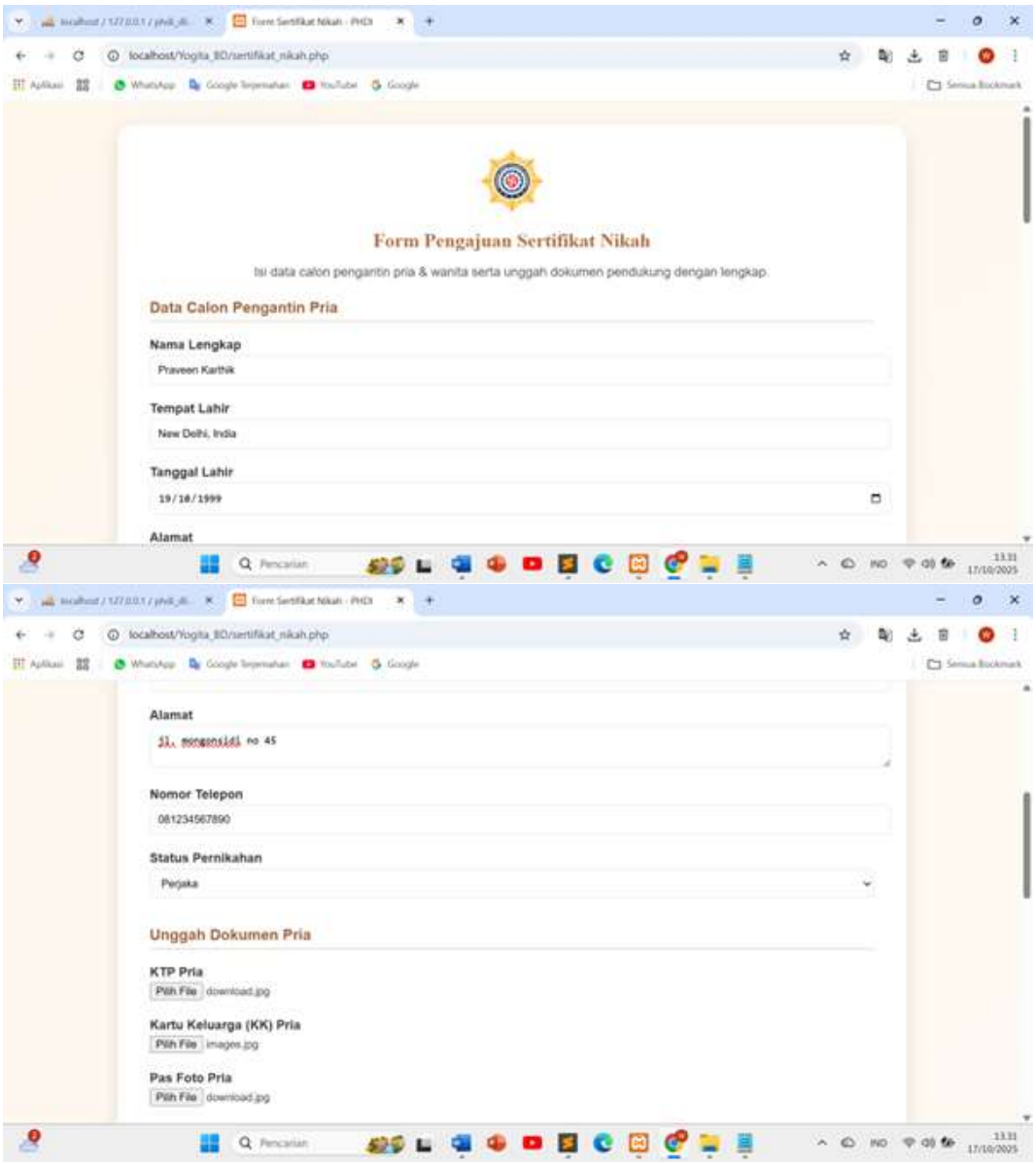
Gambar 5. 6 Tampilan form pilihan pengajuan layanan

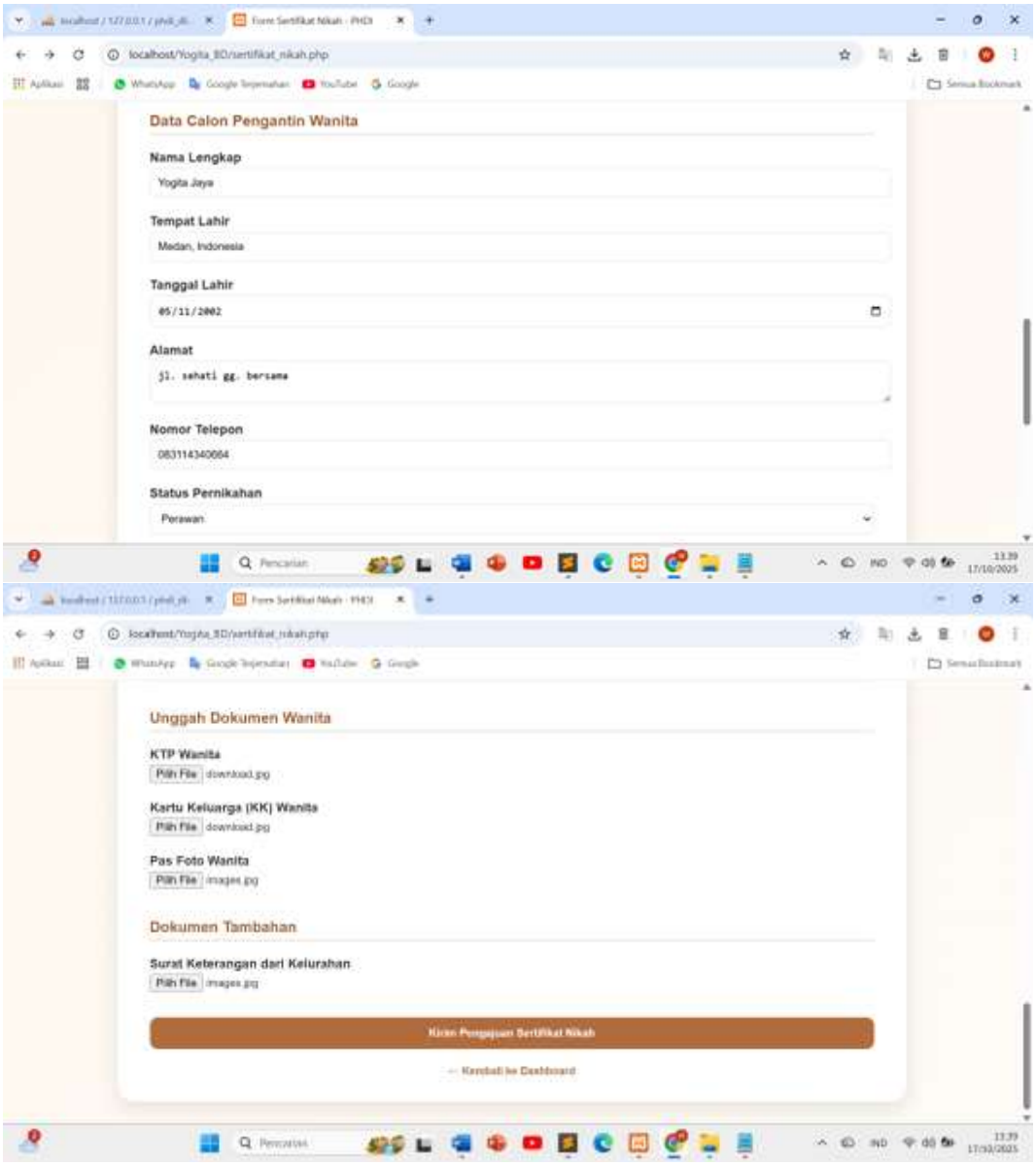
Pada tahap berikutnya, pengguna dapat memilih jenis layanan yang dibutuhkan melalui form pengajuan layanan. Umat diharuskan mengisi data secara lengkap, seperti jenis layanan, tanggal pengajuan, serta

mengunggah dokumen pendukung yang dibutuhkan (misalnya KTP, KK, atau surat keterangan). Data yang dikirimkan akan otomatis masuk ke sistem untuk diperiksa oleh admin.

Form pengajuan ini menjadi elemen inti dalam sistem digitalisasi, karena menggantikan proses manual yang sebelumnya memakan waktu dan rentan kesalahan. Dengan sistem ini, semua data langsung tersimpan dalam database dan dapat diakses kapan pun oleh pihak berwenang. Proses digital ini mendukung efisiensi kerja serta mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik.

7. Form Pengajuan Layanan Pembuatan Sertifikat Pernikahan



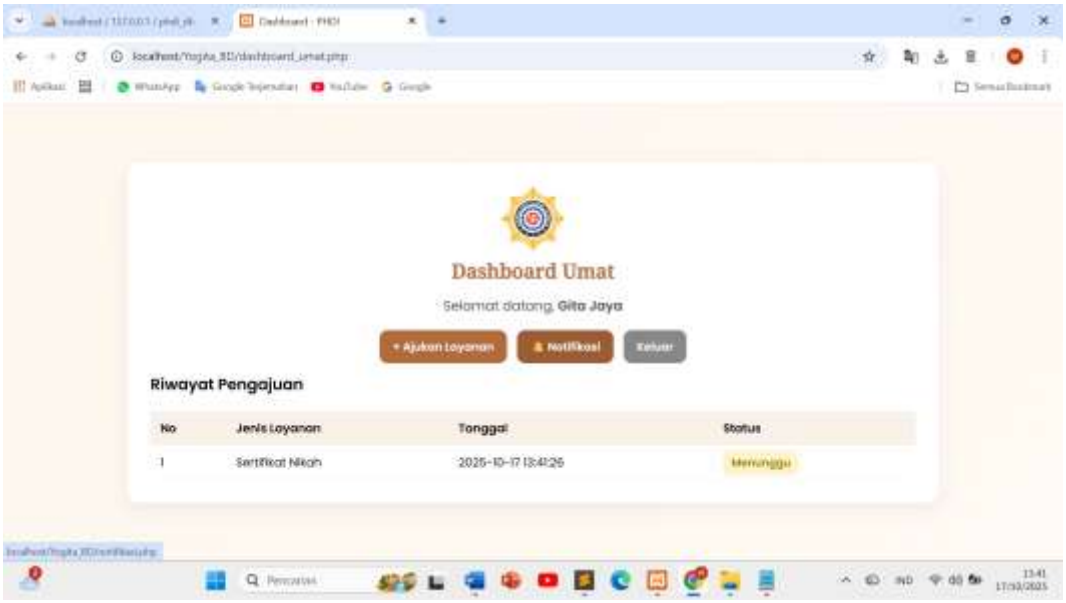


Gambar 5. 7 Tampilan form pengajuan layanan pembuatan sertifikat pernikahan

Bagian ini merupakan contoh spesifik dari pengajuan layanan pembuatan sertifikat pernikahan. Dalam form tersebut, umat mengisi data pribadi pasangan, tanggal pernikahan, serta melampirkan dokumen pendukung seperti surat rekomendasi dan foto. Setelah semua data lengkap, pengajuan dikirimkan untuk diverifikasi oleh admin.

Proses ini menunjukkan bagaimana aplikasi mempermudah pelayanan keagamaan secara digital. Sebelumnya, umat harus menyerahkan dokumen fisik langsung ke kantor, namun kini semuanya dapat dilakukan secara online. Tahapan ini juga mempercepat proses verifikasi karena admin dapat langsung mengecek kelengkapan data melalui sistem, tanpa harus menelusuri arsip manual.

8. Tampilan Akhir Setelah Pengisian Data Selesai



Gambar 5. 8 tampilan akhir setelah umat mengisi seluruh data di form pengajuan

Tahap terakhir adalah tampilan akhir setelah seluruh data dan dokumen diisi oleh umat. Pada bagian ini, sistem akan menampilkan ringkasan pengajuan serta tombol konfirmasi untuk mengirim permohonan. Setelah pengajuan dikirim, sistem memberikan notifikasi bahwa proses telah diterima dan sedang dalam tahap verifikasi oleh admin.

Tampilan akhir ini berfungsi sebagai bukti digital bahwa pengajuan sudah terekam dalam sistem. Umat juga dapat memantau status pengajuan melalui dashboard tanpa perlu mengulang proses pengisian. Dengan adanya sistem berbasis web ini, seluruh proses pelayanan—dari pendaftaran akun hingga persetujuan akhir—berjalan lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipantau oleh pengguna maupun pihak PHDI. Dan sementara menunggu tahap penyelesaian dokumen oleh admin dan ketua pengguna/umat dapat melaksanakan upacara pernikahan secara adat dan agama hindu secara simbolik

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses administrasi di Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Sumatera Utara pada awalnya masih bergantung pada sistem layanan manual, seperti pencatatan berkas dalam bentuk fisik, pengajuan dokumen secara langsung, serta proses verifikasi yang memerlukan waktu cukup lama. Kondisi tersebut mengakibatkan pelayanan menjadi kurang efisien, terutama bagi umat yang berada jauh dari kantor PHDI.

Melalui pendekatan kualitatif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, diperoleh informasi mendalam mengenai kebutuhan digitalisasi layanan. Sistem administrasi digital berbasis web yang dikembangkan dalam penelitian ini berhasil menyediakan fitur pengajuan layanan secara online, unggah dokumen pendukung, verifikasi data oleh admin, persetujuan oleh Ketua PHDI, serta penyimpanan arsip secara otomatis dalam basis data yang terstruktur. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berjalan sesuai harapan dan mampu mempercepat proses pelayanan serta mempermudah pelacakan status dokumen oleh umat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan digitalisasi administrasi mampu meningkatkan kecepatan, akurasi, transparansi, dan aksesibilitas layanan di PHDI Sumatera Utara. Selain itu, sistem digital ini berpotensi mendukung tata kelola kelembagaan yang lebih profesional dan berkelanjutan. Agar implementasi sistem dapat optimal dalam jangka panjang, diperlukan pelatihan bagi admin dan pengurus, serta penguatan keamanan data digital untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi umat.

REFERENCES

Abimanyu, R., Pratama, D., & Raharjo, A. (2023). Business Intelligence and Knowledge Management System for Strategic Decision Support. Journal of Information System Research, 8(2), 45–58.

Andersson, P. (2022). Digitalization and Public Administration Reform in Modern Bureaucracy. Public Sector Innovation Journal, 14(1), 33–47.

Arifin, S. (2022). Sistem Informasi Manajemen: Konsep dan Aplikasi dalam Organisasi Modern. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Azzahra, L., & Nurjaman, H. (2023). Artificial Intelligence and Internet of Things in Digital Transformation Era. Journal of Digital Innovation, 6(3), 112–125.

Bellon, T. (2024). Digital Administration and Organizational Accountability in the Public Sector. International Journal of Governance and Digital Society, 12(1), 21–38.

Fischer, R., Keller, D., & Madsen, H. (2021). E-Governance and Digital Transformation in Public Administration. Springer Nature, Switzerland.

Haug, M. (2024). Gradual Change in Digital Public Services: Lessons from Government Innovation. Journal of Public Management, 19(2), 77–89.

Latupeirissa, S. (2024). Strategi Digitalisasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 10(1), 88–100.

Lestari, N., & Sari, R. (2022). Pengaruh Digitalisasi Administrasi terhadap Kepuasan Pengguna Layanan Publik di Era Modern. Jurnal Manajemen dan Teknologi Informasi, 9(2), 54–65.

Marwiyah, N. (2023). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digitalisasi. Yogyakarta: Deepublish.

Mahmoudian, A., & Mousavi, M. (2023). Web-Based Decision Support System for Organizational Efficiency. International Journal of Computer Science and Information Systems, 11(4), 211–225.

Paendong, Y. (2023). Administrasi Digital: Teori dan Implementasi dalam Tata Kelola Organisasi. Bandung: Alfabeta.

Putra, R. (2021). Perancangan Sistem Berbasis Web untuk Optimalisasi Layanan Publik. Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi, 7(1), 25–39.

Sari, D. (2020). Digitalisasi Pelayanan Publik sebagai Upaya Reformasi Birokrasi di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi, 17(3), 211–220.

Sutanta, E. (2020). Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wahyudi, A. (2021). Teknologi Informasi sebagai Pendorong Transformasi Digital pada Sektor Publik. Jurnal Teknologi dan Inovasi, 9(2), 130–142.